

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kepemimpinan

Menurut Thoha (2005:259) kepemimpinan kadangkala diartikan sebagai pelaksanaan otoritas dan pembuatan keputusan, ada juga mengartikan suatu inisiatif untuk bertindak yang menghasilkan suatu pola yang konsisten dalam rangka mencari jalan pemecahan dari suatu persoalan bersama. Menurut Muhyi (2011:122) kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi suatu kelompok kearah pencapaian tujuan. Lebih jauh lagi Terry (dalam Thoha, 2005:259) merumuskan bahwa kepemimpinan itu adalah aktivitas untuk mempengaruhi orang-orang agar diarahkan mencapai tujuan organisasi. Konsep kekuasaan amat dekat dengan konsep kepemimpinan. Kekuasaan merupakan sarana bagi pemimpin untuk mempengaruhi perilaku pengikut-pengikutnya. Dalam rangka memberikan ulasan tentang hubungan yang integral antara kepemimpinan dan kekuasaan, hervey, blanchard dan natemeyer merasakan bahwa pemimpin-pemimpin itu hendaknya tidak hanya menilai perilaku kepemimpinan mereka agar mengerti bagaimana sebenarnya mereka mempengaruhi orang-orang lain, akan tetapi mereka seharusnya juga mengamati posisi mereka dan cara menggunakan kekuasaannya. Setiap organisasi apa pun bentuk dan namanya adalah suatu sistem yang memungkinkan setiap orang dapat mengembangkan kekuasaanya untuk berbuat sesuatu untuk tidak melakukan sesuatu. Setiap manajer,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau administrator, atau pemimpin adalah seseorang yang diharapkan melaksanakan beberapa jenis kekuasaan di dalam atau atas suatu organisasi. Menurut Mintzberg (dalam Luthans, 2006:689) peran pemimpin masa kini sesungguhnya memiliki tanggung jawab interpersonal dan informasional.

2.1.1 Karakteristik Seorang Pemimpin

Menurut Wadsworth (2008:17-18), bahkan jika pemimpin tidak memiliki sifat-sifat umum, mereka mempunyai kesamaan karakteristik sebagai berikut:

1. Mempunyai kemauan untuk memimpin bukanya mengelola;
2. Memelihara moral yang tinggi diantara pekerjaan mereka;
3. Menginspirasi komitmen dan kerjasama tim;
4. Menunjukkan, pada saat yang sama, energi, gairah, dan antusiasme;
5. Terfokus dan mampu memfokuskan orang yang mereka pimpin;
6. Memandang masa depan dengan harapan dan optimisme;
7. Mengambil risiko secara hati-hati;
8. Jujur pada diri mereka sendiri;
9. Terus berjalan walaupun banyak hambatan;
10. Mengetahui bidang dan pekerjaan mereka secara mendalam;
11. Bekerja untuk menanam nilai pada orang-orang mereka;
12. Mengorientasikan diri mereka sendiri terhadap konsumen;
13. Mengambil perspektif jangka panjang;
14. Mengundang input;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Mentoleransi kekeliruan;
16. Menetapkan standar dan tujuan;
17. Tetap tenang saat diserang kritikan;
18. Memastikan orang mempunyai sumber daya untuk melakukan pekerjaan;
19. Percaya pada diri sendiri dan orang-orangnya; dan
20. Memulai perubahan daripada bereaksi terhadap perubahan.

2.1.2 Prinsip Kepemimpinan

Menurut Wirjana (2006:7-9) kepemimpinan harus berlandaskan beberapa prinsip di bawah ini:

1. Bahwa semua orang memiliki potensi untuk berkembang. Dengan demikian seseorang pemimpin berkewajiban untuk mengaktualisasikan potensi orang-orang yang mereka pimpin secara optimal, utama dan terutama bagi kebaikan mereka dan organisasi;
2. Yang berbeda tetapi terkait dengan prinsip diatas ialah prinsip yang disebut solidaritas dan subsidiaritas. Solidaritas artinya, solider/senasib sepenanggungan dengan yang dipimpin. Subsidiaritas suatu prinsip yang ada pada saat ini sering disebut “swadaya”, dalam arti keputusan yang menyangkut nasib dan kehidupan suatu kelompok atau masyarakat tertentu harus diambil oleh mereka sendiri dan tidak diputuskan oleh pemimpin atau kelompok lain;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mengasihi sesama diajarkan oleh semua agama. Ini merupakan suatu norma perilaku universal yang merupakan cinta positif kepada sesama, juga terhadap yang dipimpin;
4. Akuntabilitas/tanggung gugat harus merupakan prinsip yang dipegang oleh pemimpin dan dituntut oleh yang dipimpin. Akuntabilitas ialah memenuhi janji-janji yang dibuat serta memenuhi komitmen yang telah diberikan, mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan bagaimana dia menggunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya. Akuntabilitas juga menyangkut menghargai orang lain. Oleh karena itu seseorang pemimpin harus berani mendelegasikan wewenang kepada orang lain tetapi bertanggungjawab;
5. Kepemimpinan yang ideal ialah kepemimpinan yang menempatkan hidup sebagai pelayanan dan bukan hanya pada karir semata; dan
6. Kepemimpinan menyangkut kemauan dan kemampuan untuk berubah, suatu sikap yang dinamis dan tidak statis.

Konsep kepemimpinan dengan prinsip-prinsip seperti tersebut diatas jelas menempatkan manusia sebagai titik sentral dari seluruh keputusan yang diambil, terutama yang menyangkut nasib dan kehidupan dari mereka yang dipimpin dan masyarakat luas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.3 Nilai-nilai yang Mendasari Kepemimpinan

Menurut Thoha (2005:19) Nilai-nilai yang mendasari kepemimpinan yang didambakan, secara garis besar nilai-nilai itu ialah:

1. Menciptakan lingkungan yang mendukung/suportif dimana orang dapat tumbuh, berkembang, dan hidup dengan aman dengan sesama;
2. Meningkatkan keselarasan dengan alam sehingga dengan demikian menyediakan kesinambungan bagi generasi-generasi yang akan datang; dan
3. Menciptakan komunitas-komunitas yang saling peduli dan berbagi tanggung jawab, dimana setiap orang mempunyai arti dan kesejahteraan serta martabat masing-masing orang dihargai dan didukung.

Nilai akhir dari kepemimpinan haruslah untuk meningkatkan persamaan, keadilan sosial, dan kualitas kehidupan untuk memperluas akses dan kesempatan untuk menguatkan respek perbedaan dan keanekaragaman, meperkuat demokrasi, mengembangkan masyarakat madani dan tanggung jawab warga, memajukan pengkayaan kultural, ekspresi, kreatif, kejujuran intelektual, kemajuan pengetahuan, personal yang disertai tanggungjawab sosial.

Menurut Thoha (2005:26) seorang pemimpin yang ingin berhasil sebagai pemimpin, yaitu:

1. Mengajak;
2. Memotivasi;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Memfasilitasi; dan
4. Mengarahkan.

2.1.4 Fungsi-fungsi Kepemimpinan

Seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya harus menjalankan kelima fungsi kepemimpinan. Sedangkan menurut Nawawi (2006:35) menyebutkan ada lima fungsi pemimpin. Kelima fungsi pemimpin itu adalah:

1. Fungsi Instruktif

Fungsi ini berlangsung dan bersifat komunikasi satu arah, pemimpin sebagai pengambil keputusan berfungsi memerintahkan pelaksanaannya pada orang-orang yang dipimpin. Pemimpin sebagai Komunikator merupakan pihak yang menentukan apa (isiperintah), bagaimana (cara mengerjakan perintah), bilamana (waktu memulai, melaksanakan dan melaporkan hasilnya), dan dimana (tempat mengerjakan perintah) agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Fungsi orang yang dipimpin hanyalah melaksanakan perintah. Inisiatif tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan perintah itu, sepenuhnya merupakan fungsi pemimpin.

2. Fungsi Konsultatif

Fungsi ini berlangsung dan bersifat komunikasi dua arah. Pada tahap pertama Dalam usaha menetapkan keputusan, fungsi pemimpin sebagai konsultan untuk mendengarkan pendapat, saran serta pertanyaan dari bawahannya, mengenai keputusan yang akan diambil oleh pemimpin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Fungsi Partisipasi

Dalam fungsi ini pemimpin menjalankan serta mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Setiap anggota kelompoknya memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan yang dijabarkan dari tugas-tugas pokok, sesuai dengan posisi atau jabatan masing-masing. Pemimpin juga tidak hanya ikut dalam proses pembuatan keputusan.

4. Fungsi Delegasi

Fungsi ini pemimpin sebagai pemegang wewenang tertinggi harus bersedia dan dapat mempercayai orang-orang lain, sesuai dengan posisi atau jabatannya, apabila diberi atau mendapat pelimpahan wewenang.

5. Fungsi Pengendalian

Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses dan efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Sehubungan dengan itu bahwa fungsi pengendalian dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi dan pengawasan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Peran

Soerjono (2009:212-213) mengatakan peran merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Selain itu Suhardono (1994:03) menjelaskan peran apabila dijelaskan merujuk pada konotasi ilmu sosial diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu karakterisasi (posisi) dalam struktur sosial. Sehingga apabila seseorang menjalankan peran maka orang tersebut sedang menjalankan fungsi dalam posisinya.

2.2.1 Peran Pemimpin Dalam Organisasi

Siagian (2002:66) mengatakan, seseorang yang menduduki jabatan pemimpin dalam suatu organisasi memainkan peran yang sangat penting, tidak hanya secara internal tetapi juga eksternal. Peran tersebut dapat dikategorikan dalam tiga bentuk tersebut antara lain :

1. Peran yang Bersifat Interpersonal

Salah satu tuntutan yang harus dipenuhi seorang pimpinan adalah keterampilan insani (*human skills*). Peran “interpersonal” ini terdiri dari tiga bentuk, antara lain:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pertama, selaku simbol keberadaan organisasi yang dimainkan dalam berbagai kegiatan yang sifatnya legal dan seremonial;
- b. Kedua, selaku pimpinan yang bertanggung jawab untuk memotivasi dan memberikan arahan kepada para bawahan; dan
- c. Ketiga, peran selaku penghubung dimana seorang pimpinan harus dapat menciptakan jaringan yang luas dengan memberikan perhatian khusus kepada mereka yang mampu berbuat sesuatu bagi organisasi dan juga berbagai pihak yang memiliki informasi yang diperlukan oleh organisasi.

2. Peran yang Bersifat Informasional

Kegiatan organisasi dapat terlaksana dengan efisien dan efektif dengan dukungan informasi yang mutakhir, lengkap dan dapat dipercaya karena diolah dengan baik. Peran tersebut terdiri dari tiga bentuk, yaitu:

- a. Pertama, seorang pimpinan merupakan pemantau arus informasi yang terjadi dari dan ke dalam organisasi;
- b. Kedua, peran sebagai pembagi informasi. Informasi yang diperoleh seorang pimpinan selain berguna dalam fungsi kepemimpinannya juga harus disalurkan kepada pihak lain dalam organisasi; dan
- c. Ketiga, peran selaku juru bicara organisasi. Peran ini menyangkut kemampuan menyalurkan informasi secara tepat kepada berbagai pihak di luar organisasi, terutama menyangkut informasi tentang rencana, kebijaksanaan, tindakan, dan hasil yang telah dicapai oleh organisasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Peran Pengambilan Keputusan

Peran dari seorang pemimpin yang tidak kalah pentingnya dari peran sebelumnya ialah peran dalam pengambilan keputusan. Peran ini mengambil empat bentuk:

- a. Selaku *entrepreneur*, peran ini dimainkan melalui pertemuan-pertemuan yang dimaksudkan untuk merumuskan dan menetapkan strategi yang bermuara pada dirancang dan dimulainya proyek untuk mewujudkannya;
- b. Peredam gangguan, peran ini antara lain berarti kesediaan memikul tanggung jawab untuk mengambil tindakan korektif apabila organisasi menghadapi gangguan serius yang apabila tidak ditangani akan berdampak negatif kepada organisasi;
- c. Pembagi sumber dana dan daya, peran ini tampak ketika pimpinan dengan kekuasaan atau kewenangannya mengalokasikan dana dan daya. Termasuk diantaranya wewenang untuk menempatkan orang pada posisi tertentu, wewenang, mempromosikan seseorang, menurunkan pangkat seseorang dari jabatannya, mengenakan sanksi, dan wewenang mengalokasikan dana termasuk waktu; dan
- d. Perunding bagi organisasi, pimpinan berperan selaku perunding untuk organisasi dalam berinteraksi dengan berbagai pihak di luar organisasi.

2.3 Kepala Desa

Kepala Desa adalah penguasa tunggal di dalam pemerintahan desa, bersama-sama dengan pembantunya dan ia merupakan pamong desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan rumah tangga desa, disamping itu ia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan. Kepala desa tidak bekerjasendiri, ia memiliki bawahan yang membantunya dalam urusan pemerintahan dan mengurus desa sekalipun dikatakan bahwa kepala desa merupakan penguasa tunggal di dalam pemerintahan desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asalusul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014).

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa (Pasal 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014). Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (Pasal 3 Undang-undang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 6 Tahun 2014). Menurut Nurcholis (2011:2) kedudukan desa sangat penting baik sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional ataupun sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia.

2.3.1 Tugas, Wewenang, Hak, dan Kewajiban Kepala Desa

Mengenai tugas, wewenang, hak, dan kewajiban kepala desa dapat dilihat di Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 26 dan 27, adapun bunyi sebagai berikut:

Pasal 26:

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. Menetapkan Peraturan Desa;
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
 - e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;

- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 27:

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Pelestarian Kebudayaan

Pelestarian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata dasar *lestari* yang artinya adalah tetap selama-lamanya tidak berubah. Kemudian dalam kaidah penggunaan Bahasa Indonesia, penggunaan awalan *pe-* dan akhiran *-an* artinya digunakan untuk menggambarkan sebuah proses atau upaya (kata kerja). Jadi berdasarkan kata kunci *lestari* ditambah awalan *pe-* dan akhiran *-an*, maka yang dimaksud pelestarian adalah upaya atau proses untuk membuat sesuatu tetap selama-lamanya tidak berubah. Bisa pula didefinisikan sebagai upaya untuk mempertahankan sesuatu supaya tetap sebagaimana adanya. Para pakar antropologi budaya Indonesia umumnya sependapat bahwa kata “kebudayaan” berasal dari bahasa Sansekerta *buddhayah*. Kata *buddhayah* adalah bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti “budi” atau “akal”. Secara etimologis, kata “kebudayaan” berarti hal-hal yang berkaitan dengan akal Koentjaraningrat (dalam Maran, 2000: 24). Menurut Maran (2002: 24) kata “Kebudayaan” itu sepadan dengan kata *culture* dalam bahasa Inggris. Kata *culture* itu sendiri berasal dari bahasa Latin *colere* yang berarti merawat, memelihara, menjaga, mengolah, terutama, mengolah tanah atau bertani.

Samovar dan Porter (dalam Liliweri, 2002:9) mengungkapkan kebudayaan dapat berarti simpanan akumulatif dari pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, hirarki, agama, pilihan waktu, peranan, relasi ruang, konsep yang luas, dan objek material atau kepemilikan yang dimiliki dan dipertahankan oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekelompok orang atau suatu generasi. Menurut Liliweri (2002:9-10) kebudayaan dapat diartikan sebagai:

1. *Cultivation* (pengolahan, penanaman) atau *tillage* (pengusahaan tanah) (catatan: dua istilah ini merupakan konsep pertanian);
2. Kegiatan untuk mengembangkan pilih peningkatan pendidikan dan moral, misalnya melalui pendidikan;
3. Pendamping ahli dan pelatihan;
4. a. Pencerahan dan peningkatan mutu rasa melalui pencarian dan pelatihan intelektual dan estetika; dan
b. Berkenaan dengan perasaan melalui seni, aspek-aspek kemanusiaan dari keilmuan yang diperoleh dari pelatihan ketrampilan atau pekerjaan.
5. a. Integrasi pola-pola pengetahuan manusia, kepercayaan, dan pelaku, yang tergantung pada kapasitas manusia untuk mempelajari dan mengalihkan pengetahuan bagi generasi lain; dan
b. memperkuat kepercayaan, bentuk sosial, dan unsur-unsur material dari sebuah ras, agama, atau kelompok sosial.
6. Melestariakan kehidupan material melalui media.

Dapat disimpulkan pelestarian kebudayaan merupakan upaya untuk mempertahankan agar/supaya budaya tetap sebagaimana adanya sampai kepada generasi selanjutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4.1 Unsur-unsur Kebudayaan

Menurut Maran (2000:38) unsur-unsur kebudayaan sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Kepercayaan berkaitan dengan pandangan tentang bagaimana dunia ini beroperasi. Kepercayaan itu bisa berupa pandangan-pandangan atau interpensi-interpensi tentang masa lampau, bisa berupa penjelasan-penjelasan tentang sekarang, bisa berupa prediksi-prediksi tentang masa depan, dan bisa juga berdasarkan *common sense*, akal sehat, kebijaksanaan yang dimiliki suatu bangsa, agama, ilmu pengetahuan, atau suatu kombinasi antara semua hal tersebut.

2. Nilai

Jika kepercayaan menjelaskan apa itu sesuatu, nilai menjelaskan apa yang harus terjadi. Nilai itu luas, abstrak, standar kebenaran yang harus dimiliki, yang diinginkan, dan yang layak dihormati. Meskipun pengakuan luas, nilai-nilai pun jarang ditaati oleh setiap anggota masyarakat. Namun nilailah yang menentukan suasana kehidupan kebudayaan dan masyarakat.

3. Norma dan sanksi

Jika nilai itu cita-cita abstrak, norma adalah suatu aturan khusus, atau seperangkat peraturan tentang apa yang harus dan apa yang tidak harus dilakukan oleh manusia. Jika norma-norma garis pedoman, sanksi-sanksi

merupakan kekuatan penggerakanya. Sanksi adalah ganjaran atau hukuman yang memungkinkan orang mematuhi norma. Sanksi-sanksi itu bisa bersifat formal bisa juga bersifat informal.

4. Teknologi

Teknologi adalah cara kerja manusia. Dengan teknologi manusia secara intentif berhubungan dengan alam dan membangun kebudayaan dunia sekunder yang berbeda dengan dunia primer (alam).

5. Simbol

Simbol adalah sesuatu yang dapat mengekspresikan atau memberikan makna- sebuah salib atau patung budha, suatu konstitusi, suatu bendera.

6. Bahasa

Bahasa adalah “gudang kebudayaan” (Harrof, 1962). Berbagai arti yang diberikan manusia terhadap objek-objek, pariwisata-periwisata, dan perilaku merupakan jantung kebudayaan. Dan bahasa merupakan sarana utama untuk menangkap, mengkomunikasikan, mendiskusikan, mengubah, dan mewariskan arti-arti ini kepada generasi baru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4.2 Ciri-ciri Kebudayaan

Menurut Maran (2000:57) ciri-ciri kebudayaan sebagai berikut:

1. Kebudayaan adalah produk manusia. Artinya, kebudayaan adalah ciptaan manusia bukan ciptaan Tuhan atau Dewa. Manusia adalah pelaku sejarah dan kebudayaan;
1. Kebudayaan selalu bersifat sosial. Artinya kebudayaan tidak pernah dihasilkan secara individual, melainkan oleh manusia secara bersama. Kebudayaan adalah suatu karya bersama bukan karya perorangan;
2. Kebudayaan diteruskan lewat proses belajar. Artinya, kebudayaan itu diwariskan dari generasi yang satu ke generasi lainnya melalui suatu proses belajar. Kebudayaan berkembang dari waktu ke waktu karena kemampuan belajar manusia. Tampak disini bahwa kebudayaan itu selalu bersifat historis, artinya proses yang selalu berkembang;
3. Kebudayaan bersifat simbolik, sebab kebudayaan merupakan ekspresi, ungkapan kehadiran manusia. Sebagai ekspresi manusia, kebudayaan itu tidak sama dengan manusia. Kebudayaan disebut simbolik, sebab mengekspresikan manusia dan segala upayanya untuk mewujudkan dirinya; dan
4. Kebudayaan adalah sistem pemenuhan berbagai kebutuhan manusia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4.3 Upaya-upaya Pelestraian Kebudayaan Asli Bangsa Indonesia

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Budaya Masyarakat pasal 3 yang berbunyi:

1. Konsep dasar;
2. Program dasar; dan
3. Strategi pelaksanaan.

Dan dalam pasal 4 yang berbunyi tentang: konsep dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a meliputi:

1. Pengakomodasian keanekaragaman lokal untuk memperkokoh kebudayaan nasional;
2. Penciptaan stabilitas nasional, dibidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama maupun pertahanan dan keamanan nasional;
3. Menjaga, melindungi, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat;
4. Penumbuhkembangan semangat kebersamaan dan gotong royong;
5. Partisipasi, kreativitas, dan kemandirian masyarakat;
6. Media menumbuhkembangkan modal sosial; dan
7. Terbentuknya komitmen dan kepedulian masyarakat yang menjunjung tinggi nilai sosial budaya.



2.5 Pandangan Islam Terhadap Kepemimpinan

Dilingkungan masyarakat dan dalam organisasi formal maupun non formal selalu ada seseorang yang dianggap lebih dari yang lain. Seseorang yang memiliki kemampuan lebih tersebut kemudian diangkat atau ditunjuk sebagai orang yang dipercaya untuk mengatur orang lain. Biasanya orang seperti itu disebut pemimpin. Dari kata pemimpin itulah muncul istilah kepemimpinan. Didalam islam kepemimpinan identik dengan istilah khilafah yang berarti wakil. Kepemimpinan dalam Al-qur'an disebutkan dengan istilah imamah, pemimpin dengan istilah imam. Al-qur'an mengaitkan kepemimpinan dengan hidayah dan pemberian petunjuk pada kebenaran. Seorang pemimpin tidak boleh melakukan kezaliman, dan tidak pernah melakukan kezaliman dalam segala tingkat kezaliman: kezaliman dalam keilmuan dan perbuatan, kezaliman dalam mengambil keputusan dan aplikasinya. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 30:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتُسْفِكُ فِيهَا يَفْسِدُونَ فِيهَا أَتَجْعَلُ قَالَُوا خَلِيفَةً لِّأَرْضِ فِي جَاعِلٌ إِنَّ لِلْمَلَكَةِ رَبُّكَ قَالَ وَإِنْ

﴿تَعْلَمُونَ لَا مَا أَعْلَمُ إِنَّي قَالَ لَكَ وَنُقَدِّسُ مُحَمَّدٌ نُسَبِّحُ وَنُحَنِّ

Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensujikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.(Al-Baqarah: 30).

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya seorang pemimpin sangat dibutuhkan dimuka bumi, walaupun para malaikat menentangnya. Karena mereka yakin bahwa manusia hanya akan membuat kerusakan dimuka bumi ini. Tetapi Allah menentangnya dan berkata “Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. Begitu juga didalam sebuah organisasi pemerintah desa memerlukan peran seorang pemimpin dalam mengatur dan memajukan desanya.

2.6 Definisi Konsep

Defenisi konsep merupakan batasan dalam penelitian yang merupakan pokok batasan pada bagian berikutnya dimaksudkan agar memberikan arah dalam penulisan pada bagian berikutnya. Menurut Faisal (2010:108) pemberian batasan atau definsi operasional tidak hanya berlaku untuk istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian tetapi juga untuk istilah “kunci” yang terdapat dalam rumusan masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian. Adapun definisi konsep sebagai berikut:

1. Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah suatu kegiatan/aktivitas mempengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Adapun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam penelitian ini kepemimpinan yang dimaksud adalah kepemimpinan kepala desa.

2. Peran

Peran adalah seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran seorang kepala desa dalam melakukan pelestarian kebudayaan.

3. Kepala Desa

Kepala desa adalah seorang yang memimpin di pemerintah desa berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Kepala desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kepala Desa di daerah Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.

4. Pelestarian Kebudayaan

Pelestarian kebudayaan merupakan upaya untuk mempertahankan agar/supaya budaya tetap sebagaimana adanya sampai kepada generasi selanjutnya. Pelestarian kebudayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dalam bidang tari, permainan rakyat, celimpung, musik, drama, kerajinan, dan silat.

2.7 Konsep Operasional

Konsep operasional berisi tentang indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel “Peran Kepala Desa Dalam Pelestarian Kebudayaan di Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan”. Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah:

Tabel 2.1 Indikator Peran Kepala Desa Dalam Pelestarian Kebudayaan di Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Peran Kepala Desa Dalam Pelestarian Kebudayaan di Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan	Mendorong pertumbuhan dan berkembangnya peran serta masyarakat	1. Meningkatkan kegiatan kebudayaan daerah 2. Apresiasi seni budaya daerah 3. Sosialisasi dan publikasi nilai-nilai budaya daerah kepada masyarakat 4. Fasilitas pengembangan kualitas sumber daya manusia
	Mendayagunakan potensi peran serta masyarakat	1. Inventarisasi aktivitas adat, seni, dan budaya daerah 2. Inventarisasi aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah

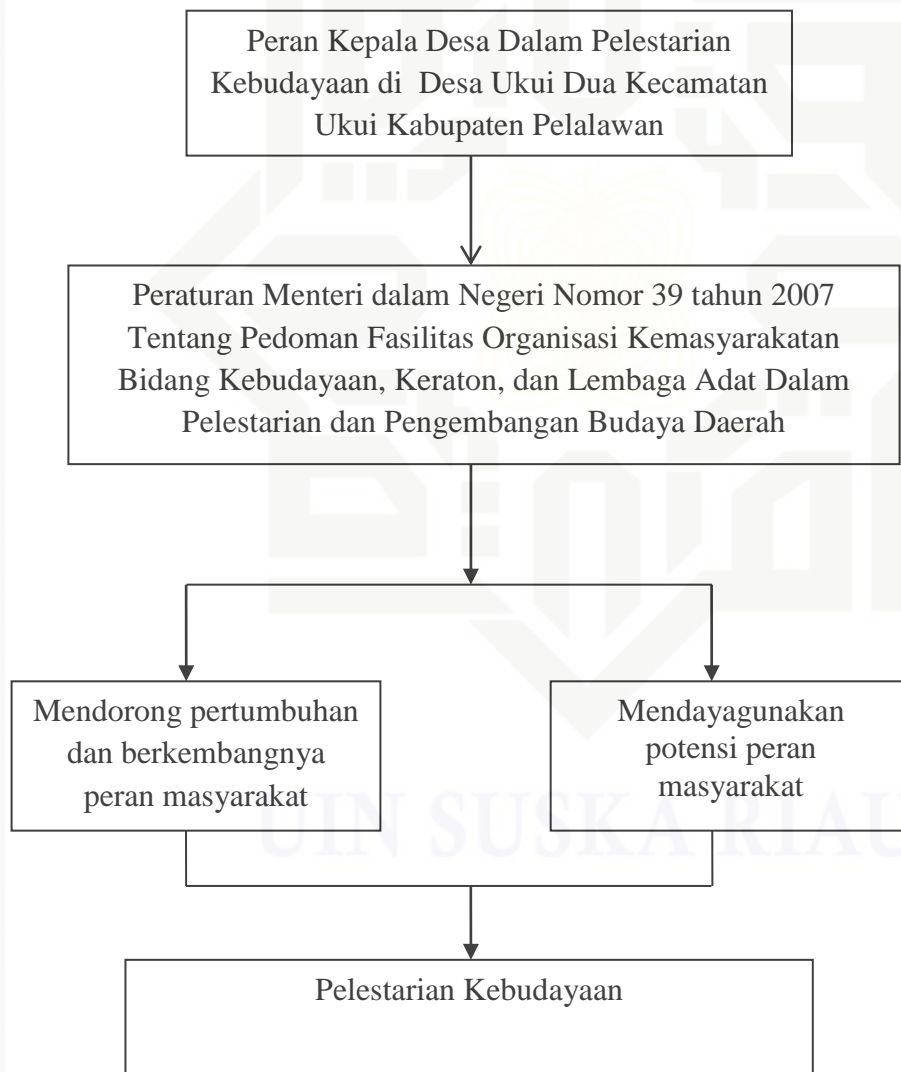
Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Kerangka Berpikir

Adapun kerangka berpikir yang peneliti lakukan dalam penelitian ini menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9 Penelitian Terdahulu

Hasil dari penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan untuk membantu mendapatkan gambaran dalam kerangka berfikir. Disamping itu juga untuk dapat mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian dan faktor-faktor penting lainnya yang dapat dijadikan sebagai landasan kajian untuk dapat mengembangkan wawasan berfikir peneliti. Adapun peneliti mengambil penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Asnel Wati (2014) “Pelestarian Budaya Adat Istiadat di Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Pelalawan”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelestarian budaya adat istiadat di Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Pelalawan”. Hasil penelitiannya bahwa dalam melestarikan budaya adat istiadat ada faktor yang mempengaruhi antara lain perubahan serta kemajuan kehidupan dan kebudayaan modern di tengah masyarakat, berkurangnya minat dan kesadaran masyarakat khususnya generasi muda, dan banyak pengaruh-pengaruh negatif yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga menjadi hambatan tersendiri dalam pelestarian budaya adat. Adapun yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitian, variabel penelitian, dan tempat penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Martinus Usat (2013) “Fungsi Kepemimpinan Kepala Adat Dalam Pembangunan Desa Kelubir Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi kepemimpinan kepala adat dalam pembangunan Desa Kelubir Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan dan untuk mengetahui kendala kepala adat dalam pembangunan Desa Kelubir Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan. Hasil penelitiannya kepala adat memiliki peran yang cukup penting dalam pembangunan Desa Kelubir dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan kepala adat dalam mengarahkan, menjelaskan dan menggerakkan masyarakat serta memberi motivasi dalam mensukseskan program pembangunan. Namun dalam pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik kepala adat memiliki beberapa kendala yaitu: dana atau anggaran yang di dapat, sumber daya manusia setempat dan lokasi. Adapun yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitian, variabel peneitian, dan tempat penlitian,
3. Yusep (2014) “Pelestarian Tradisi Jampe Pada Masyarakat Kampung Naga Tasikmalaya”. Adapun tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kehidupan sosial budaya masyarakat Kampung Naga yang masih mempertahankan jampe sebagai warisan leluhur mereka, mengkaji dan menelaah jampe warisan nenek moyang yang diimplementasikan pada

masyarakat Kampung Naga, dan mengetahui fungsi jampe bagi masyarakat Kampung Naga. Hasil penelitiannya bahwa Jampe pada masyarakat Kampung Naga memiliki fungsi pengobatan, sosial-budaya, dan ekonomi. Adapun yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitian, variabel penelitian, dan tempat penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.